

MODAL SOSIAL PETANI PENGGARAP DALAM TATA KELOLA HUTAN PENELITIAN PARUNGPANJANG

*(The Social Capital of Labour-Farmer in the Middle of Parungpanjang Research Forest
Governance)*

Desmiwati¹, Mirna Aulia Pribadi², dan/and Kun Estri Maharani³

¹Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan
Jl. Pakuan Ciheuleut PO.BOX 105, Telp/ Fax (0251) 8327768 Kode Pos 16001, Bogor, Indonesia

²Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Jl. Gunung Batu No.5, Bogor 16610, Jawa Barat, Indonesia

³Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan
Jl. Gunung Batu No.5, Bogor 16610, Jawa Barat, Indonesia
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
e-mail: desmiwati.wong@gmail.com

Naskah masuk: 20 November 2017; Naskah direvisi: 5 Juni 2018; Naskah diterima: 8 Agustus 2018

ABSTRACT

Research forest of Parungpanjang (RF) is a part of forest area with special purposes (KHDTK), under authority of Forest Tree Seed Technology Research and Development Center Bogor. The management is carried out by involving the local community as labour farmer. The existence of labour farmer in RF give a positif impact on the management of RF. However there is no improve yet on socio-economic condition of the labour farmer. Whereas the ideal form complemented with stable social structure and good social interaction would be a foundation to build social capital. The problem is how far the strenght of the social capital of the labour farmer and how is the socio-economic relation toward RF's management? This qualitative research collect information through interviewing the labour farmer in RF of Parungpanjang, village government, community figures and supported with quEstrionairre and observation on the field during March–August 2017. The result of the study shows that the social capital of the labour farmer is low, indicated by norm is average, social net work is low, trust is average, the mutual resiprocity is also low, as well as the collective value is low. Regarding to that, the empowerment cannot merely operated on the material incentive for land-based production, it is required to develop the collective work ethos. The non-formal leadership on the labour farmer groups must be strengthened to buid the stronger labour farmer's social capital ahead.

Keywords : *labour-farmer, research forest of Parungpanjang, social capital*

ABSTRAK

Hutan Penelitian merupakan bagian kawasan hutan yang ditujukan untuk penyelenggaraan penelitian dan masuk sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Hutan Penelitian Parungpanjang berada di bawah kewenangan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Bogor dan pengelolaannya dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai petani penggarap lahan. Model pengelolaan tersebut berdampak positif namun belum meningkatkan kesejahteraan petani penggarap secara nyata. Keterbatasan modal sosial masyarakat petani penggarap dan interaksinya dengan pemangku kawasan masih menjadi penghambat bagi peningkatan manfaat pengelolaan lahan kawasan bagi petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur modal sosial tersebut secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara dengan para petani penggarap, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dan pengamatan lapangan yang telah dilakukan selama bulan Maret–Agustus 2017. Hasil penelitian menunjukkan modal sosial petani penggarap masih rendah. Norma masuk kategori sedang, jaringan sosial rendah, tingkat kepercayaan sedang, saling tukar kebaikan dan nilai-nilai termasuk lemah Walaupun demikian, hubungan antara petani penggarap dengan pengelola hutan penelitian bersifat saling

menguntungkan. Pemberdayaan petani penggarap tidak cukup jika hanya dilandaskan pada bantuan produksi berbasis lahan semata, melainkan juga harus mempertimbangkan penguatan semangat kerja kolektifnya. Basis kepemimpinan non formal pada kelompok petani penggarap menjadi hal yang harus dikuatkan dalam meningkatkan modal sosial petani penggarap.

Kata kunci: hutan penelitian Parungpanjang, modal sosial, pemberdayaan masyarakat, petani penggarap

I. PENDAHULUAN

Hutan di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berkurang. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) angka deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan tahun 2013-2014 adalah sekitar 170 ribu ha/tahun.

Hutan Penelitian digalakkan oleh pemerintah sebagai bagian dari Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pasal 18. Hutan Penelitian Parungpanjang berada di Kecamatan Parungpanjang dan Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, sekitar 70 km dari Kota Bogor, memiliki luas 134,24 ha, dan sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, sedangkan \pm 68 ha, sisanya berupa lahan terbuka dan semak belukar.

Pengelolaan lahan di areal Hutan Penelitian Parungpanjang dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai petani penggarap. Tercatat 138 kepala keluarga mendapat akses menjadi petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang.

Petani penggarap berasal dari empat desa di sekitar Hutan Penelitian Parungpanjang yakni Desa Tapos, Batok, Jagabaya dan Gintung Cileujet (Desmiwati, 2016). Pemanfaatan lahan menerapkan model diversifikasi tanaman atau tumpang sari untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan penelitian (kualitas tanaman pokok, produktivitas tanaman tumpangsari dan kesuburan tanah), serta meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat setempat.

Keberadaan petani penggarap di Hutan Penelitian Parungpanjang telah membawa dampak positif dengan terjaganya kawasan hutan disamping memberikan manfaat sosial ekonomi bagi penggarap. Namun, dengan berbagai keterbatasan sosial ekonomi yang dimilikinya, terdapat kendala dalam mengembangkan kawasan ini. Fenomena keterbatasan para petani penggarap tersebut mengindikasikan bahwa belum kuatnya modal sosial mereka sehingga perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pengembangan hutan penelitian.

Modal sosial sendiri diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang

dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Jadi dalam membahas modal sosial kita akan membicarakan lima hal utama yaitu *trust* (kepercayaan), *social networking* (jaringan) dan *social norm* (norma sosial) (Fukuyama, 2001), *Reciprocity* (hubungan saling tukar kebaikan), dan *social value* (nilai sosial) (Narotzky, 2007). Modal sosial memberikan gambaran tentang kebersamaan, persatuan, dan saling percaya dalam mencapai tujuan bersama menuju pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan masyarakat membutuhkan tingkat modal sosial tertentu untuk pengelolaan hutan lestari (Cloete, 2011; Lee, Rianti, & Park, 2017; Nath, 2010).

Modal sosial dapat menjadi kekuatan yang besar di masyarakat. Penelitian Kusumastuti (2015) misalnya menunjukkan bahwa modal sosial terikat (*bonding*) menghasilkan adaptasi masyarakat desa terhadap pembangunan infrastruktur, adaptasinya berupa kerja sama, partisipasi elemen masyarakat, pemanfaatan teknologi, prinsip saling menjaga, dan kemampuan memobilisasi sumber daya kolektif.

Secara umum tujuan jejaring kerja (*network*) dapat berlaku sebagai penghubung terutama bagi mereka yang berada di luar aktivitas lainnya (García-amado, Pérez, Iniesta-arandia, Dahringer, & Reyes, 2012). Pada penelitian Pranadji (2006) menemukan

bahwa penguatan tata nilai kemajuan merupakan inti dari penguatan modal sosial, dan akan efektif jika dimulai dari penguatan kepemimpinan masyarakat setempat, manajemen sosial, dan keorganisasian masyarakat tingkat dukuh.

Interaksi sosial menurut Soekanto (1982) merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang per orang, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antar orang perorang dengan kelompok manusia. Jadi, interaksi sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak bersama-sama secara sadar dalam mewujudkan harapan dari masing-masing pihak terhadap satu sama lain (Lawang, 2004).

Kelompok manusia tidak secara otomatis membentuk komunitas. Komunitas sejati diikat bersama oleh nilai-nilai, norma-norma, dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki bersama di antara para anggotanya sehingga akan terbentuk interaksi sosial dan kebudayaan yang selanjutnya membentuk modal sosial (Fukuyama, 2001; Roslinda, Ekyastuti, & Kartikawati, 2017).

Merujuk pada konsepsi Fukuyama, peneliti hendak menemukan penjelasan tentang bagaimana modal sosial tersebut bekerja pada kelompok petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang dalam konteks sebuah kesadaran atas kelompok atau kolektivitas. Salah satu penentu yang menentukan posisi masyarakat dalam suatu

struktur adalah ada tidaknya kesadaran pada struktur mana masyarakat petani penggarap Parungpanjang berada dan bagaimana respon mereka terhadap posisi mereka tersebut. Dengan mempertimbangkan komponen modal sosial akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku, motivasi partisipasi petani dan kecenderungan tindakan kolektifnya (Miao, Heijman, Zhu, & Lu, 2015).

Kelima aspek modal sosial yang digunakan sebagai indikator atas seberapa besar modal sosial yang dimiliki oleh para petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang adalah aspek *trust*, dapat dilihat dengan alat ukur sejauh mana relasi petani didasarkan, apakah bersifat rasional dan transaksional atau berbasis kesukarelaan dan kolektivitas, jaringan sosial dapat diukur dengan sejauh mana tiap petani penggarap memanfaatkan akses dan kekuatan masing-masing untuk dibagi dan digunakan bersama oleh petani penggarap yang lain.

Sementara itu aspek *social norm* dapat terlihat dari sejauh mana antar petani penggarap membangun kesepakatan atas kerja bersama mereka, adakah kerjasama yang dibentuk hanya bersifat sporadis sesuai kebutuhan jangka pendeknya atau akan memiliki visi dan nilai bersama yang sama-sama diperjuangkan dengan alat organisasi. Aspek saling tukar kebaikan terlihat dari

bagaimana mereka saling membantu dan bekerjasama dalam menggarap lahannya, dan terakhir aspek nilai sosial yang terlihat dari kerukunan, keharmonisan dan keselarasan mereka dalam menggarap lahannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui modal sosial yang ada di petani penggarap, sehingga perlu diketahui bagaimana kondisi kekuatan modal sosial petani penggarap saat ini dan bagaimana relasi sosial ekonomi yang dibangun antara petani penggarap dengan pengelola hutan penelitian.

Hasilnya dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengelolaan Hutan Penelitian Parungpanjang, khususnya dalam persoalan keberlanjutan dan pemberdayaan peran petani di dalam isu-isu perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah sebuah sistem pengetahuan tentang pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan diterapkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan manfaat pada masyarakat (Dongre, 2011; Kumar, 2015; Moeliono, Thuy, Bong, & Wong, 2017) sedangkan Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu bentuk perhutanan sosial yang mengedepankan tindakan-tindakan pembangunan dengan dasar pengetahuan disertai kebertanggungjawaban atas kelestarian sumber daya hutan dan masyarakat sekitar hutan sehingga memberi manfaat untuk mereka (Cronkleton, Bray, &

Medina, 2011; Poffenberger, 2006; Santika *et al.*, 2017; Siteo & Guedes, 2015).

II. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Menurut Sugiyono (2013), dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Metode studi kasus dipergunakan dengan tujuan untuk mendapatkan kajian yang mendalam, terperinci, dan menyeluruh terhadap objek penelitian yang biasanya relatif kecil (Husein, 2002).

Penelitian ini dilakukan di Hutan Penelitian Parungpanjang dan Kampung Babakan, Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor pada bulan Maret, Juni dan Agustus 2017. Hutan Penelitian Parungpanjang dipilih sebagai lokasi penelitian karena Hutan Penelitian ini pengelolaannya berada pada Balai Litbang Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan. Pengumpulan data dilakukan melalui

pembagian kuesioner kepada 6 (enam) orang petani penggarap. Kuesioner yang dibagikan dan ditanyakan pada petani penggarap terdiri dari 22 (dua puluh dua) pertanyaan yang menggunakan lima (5) komponen modal sosial yang mengkombinasikan antara komponen modal sosial Fukuyama dan komponen modal sosial Narotzky. Kelima komponen modal sosial tersebut menunjuk pada segi-segi organisasi sosial, yakni kepercayaan, norma-norma, jaringan sosial, *reciprocity* dan *social value* yang dapat memfasilitasi tindakan kolektif (Lawang, 2004).

Untuk mengetahui modal sosial pada petani penggarap mengenai norma diajukan pertanyaan seperti apakah ada peraturan yang harus dipatuhi dalam menggarap lahan, adakah sanksi yang tegas jika terdapat pelanggaran dan apakah ketua kelompok telah mengambil keputusan yang bijaksana bila ada anggota yang melakukan pelanggaran. Pada komponen jaringan ditanyakan apakah di kelompok petani ada jaringan antar sesama petani penggarap, dan jaringan antara kelompok petani penggarap dengan anggota kelompok tani yang lain atau antar kelompok tani. Pertanyaan untuk komponen kepercayaan yakni apakah dengan menggarap lahan dapat mewujudkan cita-cita yang diinginkan, dapat meningkatkan kesejahteraan maupun status sosialnya, apakah ada keinginan untuk tetap bertahan di lahan garapan, adakah komunikasi dengan sesama anggota kelompok petani

penggarap atau dengan kelompok petani lainnya. Untuk *reciprocity*, jika ada yang sedang kesulitan, apakah ada kepedulian antar anggotanya, apakah ada sikap saling memperhatikan satu sama lainnya, apakah ada kepedulian sosial antar mereka. Di komponen nilai-nilai dalam kelompok, ditanyakan apakah ada hubungan sosial yang terbentuk antar sesama anggota kelompok petani penggarap, apakah tercipta nilai kerukunan, apakah ada kegiatan yang dilakukan bersama-sama atau swadaya pada petani penggarap, adakah pertemuan atau forum untuk mendiskusikan masalah petani penggarap, bagaimana jika terdapat masalah dan apakah ada tokoh yang dijadikan panutan dalam kelompok petani.

Wawancara semi terbuka juga dilakukan terhadap 6 (enam) orang petani penggarap yang telah dibagikan kuesioner sebelumnya, empat laki-laki dan dua orang perempuan; 1 (satu) orang perangkat desa; 1 (satu) tokoh masyarakat yang aktif di kelompok tani; dan 1 (satu) orang pengelola Hutan Penelitian Parungpanjang. Pengamatan dilakukan terhadap kehidupan keseharian petani penggarap, khususnya dalam aspek mata pencarian, sistem pembagian tugas dan nilai-nilai yang ada pada petani penggarap. Kajian dokumentasi juga dilakukan terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Data hasil kuesioner, wawancara, observasi dan data hasil kajian dokumentasi

dikelompokkan dan diolah dengan analisis deskriptif kualitatif.

Deskripsi data penelitian kemudian digunakan untuk mengukur hasil kuesioner dengan melakukan skoring dan kategorisasi pada komponen modal sosial. Skala ukur dan skor yang digunakan yakni 1) Ada, skor 3; 2) Kadang-kadang, skor 2; 3) Tidak Ada, skor 1. Pembagian kategorisasi yakni:

6	10	14	18
	Rendah	Sedang	Tinggi

Gambar (Figure) 1. *Rating scale* modal sosial petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang (*Rating scale social capital peasants of Parungpanjang Research forest*)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Profil Hutan Penelitian Parungpanjang dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar

Hutan Penelitian Parungpanjang awalnya adalah kawasan hutan produksi di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Kawasan tersebut kemudian dipinjamkan kepada Balai Litbang Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Bogor, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai No.08/044-3/III/1996 dan 796/VIII-BTP/12/1996. Pada saat di bawah pengelolaan Perum Perhutani, kawasan ini didominasi trubusan Puspa (*Schima*

wallichii). Di bawah pengelolaan Balai Litbang, areal lahan di antara tumbuhan/pohon penelitian dimanfaatkan petani penggarap untuk budidaya pertanian dengan sistem tumpangsari. Jenis tanaman pokok yang ada di Hutan Penelitian Parungpanjang yakni mahoni (*Swietenia macrophylla*), akasia mangium (*Acacia mangium*), nyamplung (*Calophyllum inophyllum*), gempol (*Nauclea orientalis* Linn), merbau (*Intsia bijuga*), kepuh (*Sterculia foetida*), mindi (*Melia azedarach*), tisuk (*Hibiscus sp*) dan jabon putih (*Anthocephalus cadamba*).

Saat ini terdata sebanyak 138 orang petani penggarap yang memanfaatkan lahan hutan penelitian selama dua tahun terakhir. Jenis tanaman tumpangsarinya tidak banyak variasi, antara lain padi gogo (ditanam sekitar November dan panen pada Maret) untuk konsumsi sendiri, lengkuas (baru bisa dipanen setelah berumur satu tahun), sereh, kacang tanah, dan kentang kecil dengan durasi panen sekitar 4–5 bulan. Berdasarkan aturan yang diterapkan, jenis tanaman tumpangsari yang ditanam tidak boleh mengganggu pertumbuhan tanaman pokok, bahkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman pokoknya (Buharman *et al*, 2001).

Pemanfaatan lahan oleh petani penggarap di hutan penelitian ini merupakan salah satu sumber pendapatan petani di samping pekerjaan lainnya yang bersifat tidak tetap. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan

bahwa 43,48 persen atau sebanyak 60 orang petani penggarap adalah buruh harian lepas, sedangkan sisanya bekerja sebagai buruh tani, wiraswasta, supir, ibu rumah tangga, karyawan swasta, pedagang, dan pekebun, sehingga mereka tidak menggarap lahannya jika sedang ada pekerjaan. Rata-rata luas lahan garapan petani penggarap adalah 0,5–1,5 ha. (Desmiwati, 2016).

Para petani penggarap perempuan ikut menggarap lahan pada siang hari dan malam harinya mereka membuat kerajinan bambu berupa anyaman *boboko* untuk menambah penghasilan sehari-hari. Dalam seminggu satu orang perempuan bisa menghasilkan 7–10 buah *boboko* berukuran kecil, sedang maupun besar. Dengan modal Rp20.000,00 untuk membeli satu buah bambu berukuran besar, mereka dapat menghasilkan sepuluh buah *boboko* berukuran sedang yang akan dijual ke penampung seharga Rp7.000,00 perbuah. Dengan demikian, keuntungan yang mereka peroleh dari pembuatan *boboko* dalam seminggu adalah sebesar Rp50.000,00. Walaupun hasil tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan waktu dan energi yang dicurahkan, namun kegiatan ini tetap dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Desa Tapos, Kecamatan Tenjo adalah salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Hutan Penelitian Parungpanjang. Letak geografis desa ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Batok, sebelah selatan

berbatasan dengan Hutan Penelitian Parungpanjang dan Desa Barengkok, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ciomas dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Pangaur. Luas wilayah Desa Tapos 610,135 ha dengan jarak dari ibukota kecamatan 19 km, dari ibukota kabupaten 54 km, jarak dari ibukota propinsi 167 km dan dari ibukota negara 65 km. Penggunaan lahan di wilayah Desa Tapos dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel (Table) 1. Data penggunaan lahan di Desa Tapos (*Land utilization data in Tapos village*)

No	Jenis Lahan (Type of land)	Luas (land area) (ha)	Persentase (Percentage) (%)
1	Pemukiman (<i>Residence area</i>)	47	7,70
2	Persawahan (<i>Rice field</i>)	165	27,05
3	Perkebunan (<i>Farm</i>)	230	37,70
4	Kuburan (<i>Cemetery</i>)	8	1,31
5	Pekarangan (<i>Home garden</i>)	150	24,59
6	Perkantoran (<i>Office space</i>)	5	0,81
7	Prasarana umum (<i>Public facilities</i>)	5,135	0,81
Jumlah (Total)		610,135	100%

Sumber (Source): Statistik Desa Tapos, 2017(*Tapos Village Statistic, 2017*)

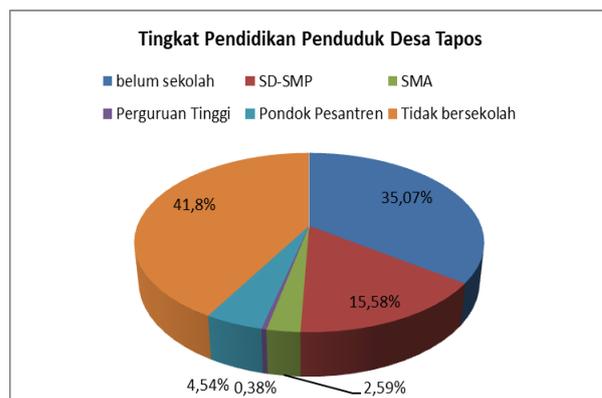
Tabel (Table) 2. Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Tapos (*Population data by sex in Tapos village*)

No	Jenis kelamin (Gender)	Jumlah penduduk (Total population) (Jiwa)	Persentase (Percentage) (%)
1	Laki-laki (<i>Male</i>)	3.872	50,30
2	Perempuan (<i>Female</i>)	3.826	49,70
Jumlah (total)		7.698	100%

Sumber (Source): Statistik Desa Tapos, 2017(*Tapos Village Statistic, 2017*)

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa rasio sex penduduk di Desa Tapos

tergolong seimbang. Jumlah penduduk yang ada tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dalam pengembangan pertanian/perladangan sebagai sumber tenaga kerja.



Sumber (Source): Statistik Desa Tapos, 2017(*Tapos Village Statistic, 2017*)

Gambar (Figure) 2. Tingkat pendidikan penduduk Desa Tapos (*Education level of Tapos Villagers*)

Penduduk Desa Tapos pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan rendah di mana dari 7.698 jiwa penduduknya, 1.200 orang tidak tamat Sekolah Dasar atau mendapatkan pendidikan sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, belum bersekolah sebanyak 2.700 orang dan yang tidak bersekolah 3.218 orang (Statistik Desa Tapos, 2017). Dari wawancara selama penelitian terungkap bahwa salah satu penyebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat disebabkan oleh sulitnya mengakses pendidikan dari segi pembiayaan sehingga pendidikan menjadi kebutuhan setelah kebutuhan pangan, sandang dan papan terpenuhi. "Memang biaya sekolah gratis tapi

ke sekolahkan perlu jajan, ngasih dua ribu rupiah setiap hari untuk jajanpun saya nggak sanggup” (Petani penggarap, 55 tahun, 4 anak, Babakan, Tapos, 2017).



Gambar (Figure) 3. Kondisi sosial ekonomi petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang (Socioeconomic condition of farmer in HP Parungpanjang)

Tingkat perekonomian penduduk suatu daerah diindikasikan salah satunya oleh mata pencaharian penduduknya. Menurut data statistik Desa Tapos 62% penduduknya menggantungkan diri pada mata pencaharian pertanian/perladangan/buruh tani, dengan jumlah total kepala keluarga petani sebanyak 1.000 KK.

Berdasarkan hasil pengamatan, dalam bertani, selagi menunggu masa panen, pada umumnya masyarakat beralih profesi menjadi pedagang di kota sekitar Tangerang, Bogor dan Jakarta. Ada juga yang menjadi buruh/kuli di proyek bangunan maupun industri-industri di seputar wilayah Bogor dan Tangerang. Peruntukan lahan untuk persawahan tadah hujan sebesar 150 ha, dan sawah irigasi

setengah teknis seluas 15 ha dan untuk perladangan/perkebunan seluas 230 ha. Sementara itu, struktur kepemilikan lahan yang terbanyak adalah yang memiliki lahan kurang dari 1 ha yaitu sebanyak 700 KK, kemudian yang tidak memiliki lahan pertanian/buruh tani 250 KK. Sebanyak 59 orang warga Desa Tapos yang berasal dari Kampung Babakan (Dusun III) adalah petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang.

B. Pembahasan

1. Modal sosial pada petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang

Modal sosial menekankan pada kebersamaan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup bersama dan melakukan perubahan yang lebih baik serta penyesuaian terus-menerus (Kusumastuti, 2015). Tipe modal sosial petani penggarap di Hutan Penelitian Parungpanjang dapat diperinci sebagai berikut:

a. Norma

Hasil wawancara menunjukkan bahwa petani penggarap percaya terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat. Mereka percaya bahwa dengan adanya norma yang mengatur kehidupannya akan tercipta ketertiban. Salah satu bentuk norma yang paling dirasakan adalah peraturan. Dalam mengelola lahan garapan mereka semua mengetahui bahwa terdapat aturan, ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh

dilakukan pada lahan garapan. Mereka juga mengetahui bahwa jika ada yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi bahkan yang terberat yakni tidak boleh lagi menggarap lahannya. Hal ini disadari sekali oleh petani penggarap sehingga sebisa mungkin mereka akan menaati peraturan yang ada.

Tabel (Table) 3. Rekapitulasi skor dan kategori norma dalam modal sosial petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang
(Recapitulation of scores and norm in social capital labour farmer in Parungpanjang research forest)

No	Pernyataan (Statement)	Skor (Score)
1	Ada peraturan yang harus ditaati (<i>There are rules that must be obey</i>)	15
2	Ada sanksi jika melanggar aturan (<i>There are sanctions if it breaks the rules</i>)	14
3	Keputusan yang diambil jika melakukan pelanggaran (<i>Decisions taken if you breaks the rules</i>)	8
Skor Rata-rata (Average scores)		12,3
Kategori (Categorize)		Sedang (Average)

Sumber (Source): Olahan sendiri, 2017



Gambar (Figure) 3. Petani penggarap di Hutan Penelitian Parungpanjang
(Local farmers in forest research Parungpanjang)

Ini sejalan dengan norma yang berlaku di masyarakat, norma sosial bersifat mengikat ke dalam, sehingga jika terdapat penyimpangan norma dalam masyarakat maka sanksinya akan disalahkan oleh masyarakat umum. Sistem seperti ini adalah bentuk kontrol sosial yang efektif. Ia tidak tertulis, namun menjadi panduan untuk menentukan apa pola perilaku yang diharapkan dari orang-orang dalam suatu masyarakat, yaitu perilaku-perilaku yang dinilai baik di masyarakat (Syahyuti, 2008).

Norma itu muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan (Blau dalam Fukuyama 1999). Artinya, kalau dalam pertukaran itu keuntungan hanya dinikmati oleh salah satu pihak saja, pertukaran sosial selanjutnya pasti tidak akan terjadi. Kalau dalam pertukaran pertama keduanya saling menguntungkan maka akan muncul pertukaran kedua, dengan harapan akan memperoleh keuntungan pula. Jika telah terulang beberapa kali dan prinsip saling menguntungkan dipegang teguh, maka dari situ munculah norma dalam bentuk kewajiban sosial, yang intinya membuat kedua belah pihak merasa diuntungkan dari pertukaran (Lawang, 2004). Bentuk norma inilah yang ada antara petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang dan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan (BP2TPTH) selaku pengelola Hutan Penelitian Parungpanjang. BP2TPTH mendapatkan manfaat dari petani penggarap

dengan terpeliharanya lahan di bawah tegakan pohon penelitian, dan petani penggarap mendapat manfaat dari BP2TPTH dengan memiliki akses produksi berupa lahan garapan sebagai sumber penghasilan.

Norma juga bersifat resiprokal, artinya isi norma menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. Dalam konteks ini, orang yang melanggar norma resiprokal yang berdampak pada berkurangnya keuntungan di kedua belah pihak, akan diberi sanksi negatif yang keras. Jaringan yang terbina lama dan menjamin keuntungan kedua belah pihak secara merata, akan memunculkan norma keadilan, yang melanggar prinsip keadilan akan dikenakan sanksi yang keras (Lawang, 2004).

Dengan adanya tanaman tumpangsari diantara tanaman pokok peneliti, maka tanaman pokok peneliti yang biasanya masih berupa bibit baru tanam akan terjaga dan terpelihara dari gangguan gulma. Petani penggarap sambil membersihkan lahan dan menjaga tanaman tumpangsarinya juga akan menjaga tanaman pokok peneliti. Biasanya petani akan mengelola lahan diantara tanaman pokok itu sampai tanaman pokoknya besar dan tajuk antar tanamannya bertemu, yakni sekitar umur tanaman pokok 5 (lima) tahunan. Ketika tajuknya bertemu akan menghalangi sinar matahari bagi tanaman tumpang sari diantaranya. Pada saat itu petani penggarap

akan pindah ke lokasi lainnya yang tanaman pokoknya masih kecil. Adanya peluang menggarap lahan di Hutan Penelitian Parungpanjang telah mampu sedikit meningkatkan kesejahteraan petani penggarap, namun yang terlihat berhasil baru sedikit orang, contohnya adalah Ketua Kelompok Blok Mindi di mana dengan lahan 1,5 hektar dalam dua tahun ini ia telah beberapa kali panen, setelah setahun menanam laja (lengkuas) ia telah panen dengan mendapatkan penjualan hingga Rp15.000.000,00 (lima belas) juta rupiah. Di dalam tahun pertama itu pula ia juga sempat panen singkong setiap empat bulan sekali dan panen pisang enam bulan sekali. Walaupun tidak banyak karena hanya sebagai tanaman pinggir dan pembatas panen singkong dan pisang sangat membantu kehidupan ekonominya.

Memang ada juga petani penggarap yang tidak mau mematuhi aturan yang telah ditetapkan, seperti kasus Pak Dion, dia sebenarnya bukan masyarakat sekitar Hutan Penelitian Parungpanjang, tapi memang telah lama ikut menggarap di sana. Ia menanam tanaman pisang dan singkong sebagai tanaman pokok tumpangsari, sehingga tanaman milik peneliti tidak berkembang. Saat diberikan peringatan dari pengelola, ia tidak mengindahkannya. Akhirnya tindakan paksa berupa pengusiran pun diambil. Iapun pergi dari lahan tersebut. Sedangkan bagi masyarakat sekitar yang juga telah lama

menggarap lahan, dilakukan pendataan dan penataan. Mereka kemudian mengajukan permohonan dengan hanya bermodalkan fotokopi KTP. Setelah itu mereka diberi akses legal untuk mengelola lahan di Hutan Penelitian Parungpanjang.

Dalam hubungannya antara pengelola Hutan Penelitian Parungpanjang dengan petani penggarap terjadi simbiosis mutualisme, dengan terjaganya komitmen diantara kedua belah pihak telah banyak keuntungan yang diperoleh. *“Tanaman pokok peneliti di bawah tegakannya bersih, terpelihara sehingga bisa tumbuh lebih optimal, tanpa mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan tanaman”* (Kepala Seksi Data Informasi dan Sarana Penelitian BP2TPTH, 2017).

Pemeliharaan tanaman harus dilakukan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut membutuhkan biaya yang besar dan pengelola tidak memiliki dana untuk melakukannya. Sementara dari segi keamanan, Hutan Penelitian Parungpanjang pun terbebas dari penyerobotan lahan dan penebangan liar. Sedangkan bagi petani penggarap, dengan adanya akses legal tersebut mereka bisa berladang dengan rasa aman, tidak lagi disebut penyerobot lahan, selain juga adanya manfaat ekonomi yang didapatkan.

b. Jaringan

Modal sosial tentang jaringan pada petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang

terindikasi rendah, mereka tidak memiliki jaringan baik di dalam maupun di luar kelompok mereka sendiri.

Tabel (Table) 4. Rekapitulasi skor dan kategori jaringan dalam modal sosial petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang
(Recapitulation of scores and categories of net works in social capital labour farmer in Parungpanjang research forest)

No	Pernyataan (Statement)	Skor (Score)
1	Memiliki jaringan antar sesama petani penggarap (Have a net works between labour farmer)	7
2	Memiliki jaringan antar petani dengan kelompok tani lain (Have a net works between labour farmer with other farmer groups)	7
Skor Rata-rata (Average scores)		7
Kategorisasi (Categorize)		Rendah (Low)

Sumber (Source): Olahan Sendiri, 2017

Namun memang ada beberapa anggota petani penggarap yang juga menjadi anggota kelompok tani lain di desanya, seperti Pak Encep yang menjadi anggota Kelompok Tani Harapan Baru pimpinan Pak Basyir di Kampung Babakan. Kelompok tani Harapan Baru inilah yang aktif berjaringan di luar hingga ke tingkat kabupaten namun sangat sedikit petani penggarap yang ikut bergabung dan terlibat aktif di jaringan kelompok tani lain.

Kelompok Tani Harapan Baru berdiri pada tahun 1996, sehingga telah berdiri lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Dari awal diketuai oleh Pak Basyir hingga saat ini. Anggotanya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan memang khusus untuk masyarakat Kampung

Babakan. Sebenarnya di setiap kampung di Desa Tapos telah dibuat kelompok tani, akan tetapi kelompok tani lainnya mati suri. Harapan Barulah yang paling aktif dan bertahan hingga sekarang. Menurut Pak Basyir, ketua kelompoknya: *“Maju tidaknya petani di desa itu tergantung pimpinan desanya, apakah ada perhatian yang besar terhadap petani atau tidak ada perhatiannya sama sekali. Pada saat pimpinan desanya aktif di bidang pertanian, kami sangat terbantu, misal pembangunan saluran air, penyuluhan pertanian, bantuan traktor, bantuan bibit hingga mengundang Pak Camat dan Muspida datang untuk panen raya, hal tersebut terjadi sepuluh tahun yang lalu. Pimpinan desa yang sekarang tidak punya perhatian terhadap masalah pertanian di desanya.”*(Babakan, Tapos, 16 Agustus 2017).

Pada masa-masa jayanya aktivitas Kelompok Tani Harapan Baru cukup padat. Anggotanya sering berkumpul di rumah Pak Basyir untuk membicarakan program-program yang akan dilakukan, atau untuk mendengarkan sosialisasi apa-apa informasi yang didapatkan Pak Basyir di luar dibagikan ke anggotanya. Namun sekarang kondisinya sedang lesu dan tidak bergairah. Penyuluh pertanian yang ada tidak aktif, hanya datang sesekali. Hal tersebut karena kesibukannya mengajar di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan juga sedang melanjutkan sekolah, sehingga hanya datang jika diminta.

Kelompok Tani Harapan Baru ini tidak ada hubungannya dengan Hutan Penelitian Parungpanjang secara langsung. Selain lokasinya yang bersebelahan, hanya ada beberapa anggotanya adalah petani penggarap di Hutan Penelitian Parungpanjang.

Sementara itu, interaksi antara ketua kelompok tani petani penggarap dengan anggotanya sendiri tidak berjalan aktif dan tidak dinamis. Ketua kelompok hanya sesekali memberikan informasi kepada anggota untuk berkumpul di pendopo balai di Hutan Penelitian Parungpanjang jika ada kegiatan. Jika tidak ada undangan dari balai, maka tidak ada dinamika dalam kelompok taninya, tidak juga melakukan saling bertukar informasi dan pengetahuan tentang pemeliharaan dan perkembangan pertanian mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat (Hasbullah, 2006) yang menyatakan bahwa jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologi khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok. Pada kelompok sosial yang biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis keturunan, pengalaman-pengalaman sosial turun temurun dan kesamaan kepercayaan pada dimensi ketuhanan cenderung memiliki kohesifitas bertingkat, tetapi rentang jaringan maupun *trust* yang terbangun sangat sempit.

c. Kepercayaan

Modal sosial tentang kepercayaan pada petani penggarap Hutan Penelitian

Parungpanjang termasuk kategori sedang (Tabel 5). BP2TPH memang telah memberikan kepercayaan kepada petani penggarap untuk mengolah lahan di bawah tegakan tanaman penelitian dengan harapan hal tersebut akan membantu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Akan tetapi melihat hasilnya dalam dua tahun terakhir ini dimana tidak banyak perubahan yang signifikan pada kondisi perekonomian mereka membuat mereka tidak bisa menggantungkan harapannya hanya pada lahan di bawah tegakan jika ingin mengangkat status sosialnya.

Tabel (Table) 5. Rekapitulasi skor dan kategori kepercayaan dalam modal sosial petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang
(Recapitulation of scores and categories of trust in social capital labour farmer in Parungpanjang research forest)

No.	Pernyataan (Statement)	Skor (Score)
1	Lahan garapan dapat meningkatkan kesejahteraan (<i>Arable land can improve welfare</i>)	15
2	Petani penggarap mampu mewujudkan cita-cita (<i>Labour farmers are able to realize their goals</i>)	9
3	Petani penggarap dapat meningkatkan status sosial (<i>Labour farmers can raise social status</i>)	11
4	Petani penggarap mampu memberikan penghargaan (<i>Labour farmers able to give awards</i>)	6
5	Memenuhi kebutuhan hidup di lahan garapan (<i>Fulfill the needs of life in arable land</i>)	15
6	Keinginan mempertahankan hidup di lahan garapan (<i>Desire to sustain life in arable land</i>)	15
7	Keinginan berkomunikasi dengan pihak lain (<i>Desire to communicate with other farmer groups</i>)	12
Skor Rata-rata (<i>Average scores</i>)		11,9
Kategori (<i>Categorize</i>)		Sedang (<i>Average</i>)

Sumber (Source): Olahan Sendiri, 2017

Menurut penelitian yang dilakukan Siswiyanti, (2006), rata-rata pendapatan dari kegiatan pertanian di desa-desa seputar kawasan hutan di Parungpanjang pada umumnya tidak cukup menghidupi keluarga. Untuk Desa Bojong, yang merupakan produksi padi sawah terbesar di Kecamatan Tenjo, dengan produksi 4.399.180 kg gabah dengan rendemen gabah ke beras 60% dan harga beras Rp4.000,00/kg, maka total pendapatan dari padi sawah adalah Rp1.055.803.200,00. jika jumlah penduduknya 7.344 orang maka rata-rata pendapatan perorang dalam setahun adalah Rp1.437.640,00/orang/tahun atau Rp119.803,00/orang/bulan. padahal kelayakan pendapatan untuk hidup layak perkapita perbulan adalah lebih dari Rp 800.000,00/orang/bulan. Untuk itu mereka harus memikirkan cara lainnya, akan tetapi selagi itu belum terjadi mereka masih tetap berharap untuk terus menggarap lahannya.

Kepercayaan antar petani penggarap cukup rendah, akan tetapi antara kelompok tani Harapan Baru dengan para petani di Kp Babakan Desa Tapos, masih sedikit memiliki kepercayaan yang lebih merupakan bentuk tolong menolong. Bentuk tolong menolong itu misalnya dengan memberikan bantuan bibit kepada petani lainnya yang memerlukan, walaupun bukan anggotanya, sehingga ia tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli bibitnya. Selain itu, ada pula yang

meminjamkan bibit dengan perjanjian setelah panen akan mengganti bibit yang dipinjam sebelumnya. Ada rasa saling percaya antar sesama petani, hal ini terjadi tidak lepas dari kepemimpinan non formal (ketua Kelompok Tani Harapan Baru) yang telah lama dipegangnya. *“Di kami ada juga bentuk tolong menolongnya, walaupun bukan dengan anggota, misal dengan memberikan bantuan bibit, sehingga mereka tidak perlu membeli, atau pernah juga meminjamkan traktor, silahkan saja, itukan punya kelompok, bukan punya saya pribadi.”* (Babakan, Tapos, 16 Agustus 2017).

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Fukuyama (1995) yang menyatakan bahwa *trust* atau kepercayaan adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

d. Hubungan timbal balik/saling tukar kebaikan (*Resiprocity*)

Modal sosial tentang *resiprocity* pada petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang cukup rendah. Hal ini terlihat dari tidak adanya kepedulian sosial, sikap saling membantu, dan saling memperhatikan antara petani penggarap. Contohnya bila ada salah satu anggota yang mengalami kesulitan, anggota kelompok lainnya tidak bisa membantu, dengan alasan mereka juga susah. Hal ini bisa juga dilatarbelakangi oleh

kurangnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok tani, misalnya penyuluhan atau kegiatan yang dapat mempererat hubungan antar sesama petani penggarap sehingga dapat meningkatkan kepedulian dan rasa saling memperhatikan sesama petani penggarap.

Tabel (Table) 6. Rekapitulasi skor dan kategori saling tukar kebaikan dalam modal sosial petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang (*Recapitulation of scores and categories of reciprocity in social capital labour farmer in Parungpanjang research forest*)

No	Pernyataan (Statement)	Skor (Score)
1	Saling membantu bila ada kesulitan (<i>Help each other when there are ills</i>)	9
2	Saling memperhatikan keadaan sesama penggarap (<i>Pay attention to the situation of labour farmers</i>)	8
3	Memiliki tingkat kepedulian sosial (<i>Have a level of social cares</i>)	8
Skor Rata-rata (<i>Average scores</i>)		8,3
Kategori (<i>Categorize</i>)		Rendah (<i>Low</i>)

Sumber (*Source*): Olahan Sendiri, 2017

Contoh pada kasus keluarga Pak Usup, mereka sangat miskin, memiliki anak 4 (empat), laki-laki semua, tidak ada yang sekolah. Pak Usup tidak mampu membayar uang sekolah bahkan memberikan uang Rp 2.000,00 untuk uang sakupun tidak sanggup. Apakah ada yang menolong? tidak, karena tetangganya yang juga sesama petani penggarap juga sama miskinnya. *“Boro-boro mbak, bahkan mau minjam duit buat makan saja mEstri langsung dijawab lagi susah juga,*

minjem ke tetangga yang lebih mampu nggak maulah mbak, dari pada nanti kami malah dihina, mending utang ke juragan boboko, nanti bayarnya dengan hasil boboko yang dibuat". (Hutan Penelitian Parungpanjang, 14 Maret 2017).

Kenyataan di atas sesuai pendapat (Hasbullah, 2006) yang menyatakan bahwa pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk, yang didalamnya memiliki bobot resiprositas rendah akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah. Ini akan juga terefleksikan dengan tingkat kepedulian sosial yang rendah, tidak saling membantu dan saling memperhatikan. Pada masyarakat yang demikian permasalahan sosial tidak mudah diatasi.

e. Nilai-nilai (*Social value*)

Modal sosial tentang nilai-nilai pada petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang juga rendah.

Tabel (Table) 7. Rekapitulasi skor dan kategori nilai-nilai dalam modal sosial petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang (*Recapitulation of scores and categories of social value in social capital labour farmer in Parungpanjang research forest*)

No	Pernyataan (<i>Statement</i>)	Skor (<i>Score</i>)
1	Rasa senasib sepenanggungan (<i>a sense of mutual responsibility</i>)	14
2	Kerukunan antar sesama petani	18

	penggarap(<i>Harmony between labour farmers</i>)	
3	Penghargaan atas prestasi kerja (<i>Appreciation for works perfomance</i>)	6
4	Kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan swadaya (<i>Activities performed by together and self-help</i>)	7
5	Forum mendiskusikan masalah penggarap(<i>The forum discusses the problem of labour farmer</i>)	8
6	Tokoh yang dijadikan panutan (<i>a leader who is a role model</i>)	6
Skor Rata-rata (<i>Average scores</i>)		9,8
Kategori (<i>Categorize</i>)		Rendah (<i>Low</i>)

Sumber (*Source*): Olahan sendiri, 2017

Petani penggarap telah disosialisasikan tentang aturan-aturan penggunaan lahan yang harus dipatuhi. Memang tidak pernah terjadi konflik yang berarti diantara sesama petani penggarap, karena memang sangat sedikitnya frekuensi komunikasi yang formal diantara mereka, seperti pertemuan rutin atau kegiatan lainnya. Padahal nilai-nilai yang hidup di masyarakat seharusnya adalah suatu ide yang dianggap benar dan penting oleh seluruh anggotanya dan hal tersebut bisa menjadi motor penggerak dalam kelompok. Nilai kolektif ini yang tidak tampak pada komunitas petani penggarap sehingga meskipun berkelompok namun orientasinya bersifat individualistik.

Nilai sosial seperti harmoni, kerukunan, prestasi, kerja keras, kompetisi adalah merupakan contoh nilai positif yang sangat umum dijumpai dalam masyarakat. Namun sayangnya nilai sosial senantiasa memiliki kandungan konsekuensi yang ambivalen. Nilai kerukunan misalnya, dianggap baik dan positif karena tidak terdapat konflik dan menjaga kerukunan hubungan sosial di masyarakat,

akan tetapi disisi lain dapat menghalangi kompetisi dan produktivitas petani penggarap. Seperti yang disebutkan Ibu Jati (50 tahun), *“Semuanya baik-baik aja disini neng, nggak ada yang rebutan lahan, yah dikasih segini sudah syukur, buat nambah-nambah di rumah. Nggak mau nambah lagi lahannya, cukup segini aja.”* (Hutan Penelitian Parungpanjang, Juni 2017).

Pada kelompok masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai kerukunan biasanya ditandai oleh suatu suasana yang harmonis, akan tetapi jika berkumpul dalam diskusi pemecahan masalah maka tidak akan cukup produktif. Pada pertemuan kelompok petani penggarap dan pengelola yang dilakukan bulan Oktober 2016, sebagai bagian upaya menjaring permasalahan yang ada tidak didapatkan diskusi yang dinamis dan pemecahan masalah yang muncul masih bersifat meminta bantuan peralatan teknis pertanian. Modal sosial yang kuat juga ditentukan oleh nilai sosial yang tercipta dari suatu kelompok masyarakat yang memberikan bobot tinggi pada nilai-nilai: kompetisi, pencapaian, keterus-terangan, dan kejujuran. Pada kelompok masyarakat tersebut akan cenderung jauh lebih cepat berkembang dan maju dibandingkan pada kelompok masyarakat yang senantiasa menghindari keterus-terangan, kompetisi, dan pencapaian.

2. Memperkuat modal sosial masyarakat

Kondisi Kampung Babakan merupakan ironi dalam pembangunan pedesaan. Jika

dilihat dari segi jarak yang tidak terlalu jauh dari ibu kota dan kota kecamatannya yang menjadi kota satelit bagi Jakarta, tidak membuat Kp. Babakan ini menjadi perhatian pembangunan. Daerah transisi di mana di sekitarnya terjadi eksploitasi tambang bahan galian C dan daerahnya menjadi lalu lalang truk pengangkut batu kali dan pasir membuat infrastruktur di daerah ini rusak parah. Banyak penduduk yang pernah menjadi buruh/kuli batu dan pasir namun tidak ada peningkatan ekonomi yang layak membuat mereka putus asa, ketika ada kesempatan untuk banting stir menjadi petani penggarap di Hutan Penelitian Parungpanjang, maka diambillah kesempatan itu. Jadi pada dasarnya kebanyakan petani penggarap ini memang bukan dari keturunan petani, sehingga ilmu, pengetahuan dan pengalamannya sebagai petani lebih didominasi oleh dikerjakan saja daripada tidak ada kerjaan dan coba-coba.

Kebijakan pengelolaan Hutan Penelitian Parungpanjang juga berganti-ganti. Suatu waktu pimpinan membolehkan dan sangat menganjurkan peneliti untuk menanam dan melakukan uji lapangan terhadap hasil-hasil penelitiannya di Hutan Penelitian Parungpanjang, sehingga juga membolehkan masyarakat sekitarnya mengelola lahan, ini sekitar awal 1990-an. Kemudian ganti pimpinan ganti kebijakan. Di tahun 2000an, peneliti tidak boleh berkegiatan di lapangan dan masyarakat sekitar tidak boleh

memanfaatkan lahan di Hutan Penelitian Parungpanjang. Berganti pimpinan, berganti pula lagi kebijakannya, barulah kemudian dilakukan penataan terhadap masyarakat yang mau menggarap lahan. Informasi tersebar ke masyarakat desa di sekitar Hutan Penelitian Parungpanjang, bahwa akan dibuka pendaftaran untuk menjadi petani penggarap dengan sistem kontrak selama 2 (dua) tahun. Banyak yang mendaftar namun akhirnya hanya diterima 120 orang, kemudian bertambah menjadi 138 orang. Dengan melakukan perjanjian perorangan dan akan dievaluasi selama 2 (dua) tahun.

Ketiadaan penyuluhan pertanianpun membuat proses bertani di lahan garapan menjadi sebuah wilayah yang penuh ketidakpastian. Tanaman apa yang lebih cocok dan lebih menghasilkan secara ekonomi, perawatan, pemupukan, dan pemberantasan hama menjadi hal yang dicoba-coba. Akibatnya seperti tahun ini, hama tikus merajalela dan menggagalkan banyak tanaman petani penggarap, mulai dari padi gogo, kacang tanah, dan singkong semuanya rusak karena hama tikus. Ditambah lagi karakteristik lahan garapan yang ada di Hutan Penelitian Parungpanjang adalah lahan marjinal dengan tingkat kesuburan yang rendah, maka ketiadaan pengetahuan tentang hal-hal diatas menjadi akumulatif dan terlihat selama hampir dua tahun menjadi petani penggarap tidak

terdapat peningkatan kesejahteraan seperti yang dibayangkan, hanya untuk bertahan hidup ditengah jeratan kemiskinan.

Keterbelakangan masyarakat pedesaan terkait erat dengan lemahnya modal sosial masyarakat di dalamnya. Sebaran kemiskinan, misal menurut indikator kebutuhan dasar manusia dengan ukuran pendapatan ekuivalen 2100 kalori per kapita per hari tidak dapat dipenuhi oleh seluruh petani penggarap di HP Parungpanjang yang ada di Kp. Babakan ini. Jika melihat tingkat kemiskinan masyarakat yang diukur berdasarkan atas kemampuan menyekolahkan anak hingga tingkat SMP, lagi-lagi seluruh petani penggarap di Kp. Babakan ini tidak sanggup menyekolahkan anaknya hingga tingkat SMP, hanya sedikit yang bisa menyekolahkannya hingga tamat SD, dan sisanya putus sekolah di tingkat SD, padahal penguatan sumberdaya manusia atau modal manusia pedesaan merupakan elemen modal sosial yang penting di pedesaan. Dari penelitian lain ditemukan bahwa terdapat hubungan erat antara kuatnya modal sosial yang dipunyai suatu masyarakat dengan kemampuannya mengatasi kemiskinan (Pranadji, 2006).

Kebutuhan pangan adalah hal yang paling mendasar bagi kehidupan masyarakat, ini adalah hal yang cukup sulit untuk sebagian besar keluarga petani penggarap. Jika masyarakat mengalami kesulitan dalam

memenuhi pemenuhan kebutuhan dasarnya (pangan), maka gejala “penghancuran solidaritas sosialnya” akan terjadi. Dilihat dari proporsi alokasi penggunaannya, sebagian besar pendapatan rumah tangga petani penggarap adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau pangan, karena pemenuhan kecukupan karbohidrat pada masyarakat pedesaan masih menjadi masalah serius. Hasil penelitian Baum (1999) dalam (Pranadji, 2006) menggambarkan bahwa semakin tercukupi kebutuhan pangan, semakin besar potensi masyarakat pedesaan untuk menguatkan modal sosialnya. Mendistribusikan kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan dasar di pedesaan dapat diartikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan menguatkan modal sosialnya.

Aspek kepercayaan atau *trust* menjadi komponen utama pembentuk modal sosial di pedesaan sedangkan aspek lain seperti kerjasama (*cooperation*) dan jaringan kerja (*net-work*), tidak akan terbentuk jika tidak dilandaskan pada terbentuknya hubungan saling percaya (*mutual-trust*) antar anggota masyarakat. Lingkaran dalam atau inti modal sosial adalah tata-nilai yang hidup di masyarakat tersebut (Pranadji, 2006).

Jika dilihat dari harapan petani penggarap untuk dapat meningkatkan taraf kehidupannya berdasarkan kondisi sumberdaya alam yang dikelola maka seluruh petani penggarap sudah

pasrah dan merasa tidak tahu harus melakukan apalagi untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Dari keseluruhan pembahasan di atas menunjukkan bahwa rendahnya modal sosial petani penggarap di Hutan Penelitian Parungpanjang sangat terkait erat dengan perkembangan kegiatan perekonomian non pertanian, pengurangan kemiskinan dan pengembangan modal manusia. Tingkat pendidikan yang masih terbatas serta tidak dimilikinya ketrampilan kerja yang memadai menyebabkan tenaga kerja tidak bisa mengakses peluang kerja yang lebih layak. Secara kuantitas, modal manusia yang tersedia sangat besar sehingga seharusnya ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang dalam meningkatkan modal sosial. Sesuai dengan yang disebutkan Fukuyama dalam (Yuliarmi, 2011) yang menyebutkan bila level saling percaya lebih rendah di masyarakat atau modal sosial tidak memadai maka menyebabkan transaksi tinggi lebih tinggi dalam masyarakat, di mana membatasi aktivitas pasar dan membatasi perdagangan dalam sebuah masyarakat. Masyarakat tingkat kampung memang memiliki kekhasan komposisi tata nilai dasar, yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, untuk membangun modal sosialnya.

Modal sosial yang ada pada petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang ada walaupun rendah, dengan tipologi sosial

berbentuk *bonding*. Modal sosial yang berbentuk *bonding* yaitu modal sosial dalam konteks ide, relasi, dan perhatian yang berorientasi ke dalam (*inward looking*). Bentuk modal sosial semacam ini umumnya muncul dan berada dalam masyarakat yang cenderung homogen. Menurut (Putnam, 1993) mengistilahkan masyarakat dengan *bonding social capital* sebagai ciri *sacred society*, yakni masyarakat yang terdominasi dan bertahan dengan struktur masyarakat yang totalitarian, *hierarchical*, dan tertutup oleh dogma tertentu. Pola interaksi sosial sehari-hari masyarakat semacam itu selalu dituntun oleh nilai-nilai dan norma-norma yang hanya menguntungkan level hierarki tertentu (Kusumastuti, 2015).

Elemen modal sosial di pedesaan yang dinilai penting adalah solidaritas, manajemen sosial, jaringan kerja sama dan kegotongroyongan setempat. Peran kepemimpinan sangat penting dalam penguatan modal sosial, namun umumnya peran kepemimpinan nonformal memiliki pengaruh lebih nyata dalam membangun dan memelihara modal sosial.

Hal ini terlihat dengan majunya kelompok tani pimpinan Haji Basyir di Kampung Babakan, selama hampir 20 tahun ia telah membangun kelompok tani Harapan Baru sehingga menjadi kelompok tani yang diperhitungkan di tingkat kecamatan hingga

kabupaten, hal inilah yang belum ditemukan dalam kelompok tani penggarap lahan Hutan Penelitian Parungpanjang. Dengan mengembangkan komponen tata nilai dasar seperti rajin, kerja keras, empati, kejujuran, sabar, rasa malu dan hidup hemat adalah tata nilai dasar yang berperan penting membentuk modal sosial di pedesaan.

Paling tidak terdapat tiga aspek yang menunjukkan penguatan modal sosial yakni: terbentuknya kerja sama dan solidaritas (“kohesivitas”), perluasan jaringan kerja (bermakna peningkatan skala kerja atau jaringan ekonomi), dan peningkatan daya saing kolektif secara berkelanjutan. Ketiga modal sosial tersebut dibangkitkan oleh sejumlah tata nilai (komposit) yang membentuk jaringan *mutual trust*, *mutual respect* dan *mutual benefit* (Pranadji, 2006).

Kunci utama dari modal sosial adalah adanya rasa percaya (*trust*) yang tinggi antar warga. Rasa percaya menjadi kunci dalam introduksi aktivitas ekonomi dalam lembaga sosial di masyarakat. Untuk itu agar mendapatkan modal sosial maka seseorang harus terhubung dengan orang lain, dimana diantaranya saling mendapatkan manfaat. Modal sosial hanya akan bermanfaat apabila didistribusikan antar individu dalam suatu struktur sosial. Modal sosial merupakan bagian dari struktur sosial yang mempunyai sifat “barang milik umum” (Widodo, 2011).

Modal sosial yang kuat antara lain dicirikan oleh berkembangnya kepercayaan sosial dalam masyarakatnya, kepedulian kepada sesama nasib yang menderita dan penghargaan yang tinggi terhadap waktu dan martabat manusia. berkembangnya rasa keadilan dan pengakuan tinggi atas hak-hak individu seperti yang berkembang dalam masyarakat madani juga menjadi ciri dari modal sosial yang kuat (Susanto, 2010).

IV. KESIMPULAN

Meskipun tidak ada mandat yang mengatur dengan tegas mengenai kewajiban Hutan Penelitian untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pemanfaatan lahannya, namun BPPTPTH telah memiliki inisiatif yang baik untuk memulainya. Pelibatan masyarakat lokal tersebut bersifat simbiosis mutualisme, dimana BPPTPTH mendapatkan manfaat dengan keberadaan petani penggarap dan begitupun sebaliknya. Namun hal tersebut tetap dalam koridor pengawasan dari balai, termasuk kewajiban petani penggarap untuk menaati aturan main yang diberlakukan.

Dalam implementasinya di lapangan, bagaimana praktik petani penggarap dalam aturan main tersebut dapat dilihat dari modal sosial yang mereka miliki. Modal sosial petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang rendah. Hal ini terlihat dari norma yang berkembang. Di sana terdapat norma kategori sedang, jaringan tidak berkembang (rendah),

tingkat kepercayaan sedang, hubungan *reciprocity* yang rendah dan nilai-nilai kolektif yang ada juga rendah. Kemiskinan petani penggarap menjadi salah satu penyebab rendahnya modal sosial di petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang. Hal ini menjadi lingkaran setan (*vicious circle*) yang berulang dan tidak terputus antara ketiadaan akses produksi, rendahnya pendidikan, modal sosial rendah dan kemiskinan.

Dengan demikian modal sosial yang rendah pada petani penggarap Hutan Penelitian Parungpanjang seharusnya dapat dijawab dengan melakukan pemberdayaan. Akan tetapi pemberdayaan petani penggarap tidak cukup dilandaskan pada pemberian bantuan material berdasarkan semangat belas kasihan (karitatif) atau pengembangan sistem usaha atau produksi berbasis lahan saja, melainkan harus juga mempertimbangkan penguatan semangat kerja kolektif dalam bentuk program khusus pemberdayaan petani penggarap oleh pengelola.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak M. Ali Humaedi yang telah memberikan bimbingan pada penulisan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Buharman, Sudrajat, D. J. (2001). Informasi Biologi dan Persyaratan Tumbuh Beberapa Jenis Tanaman Tumpang-sari Dibawah Tegakan Hutan Tanaman, 2(7).

- Cloete, A. (2011). Social cohesion and social capital : Possible implications for the common good. *Verbum et Ecclesia*, 35 (3)(2014). <https://doi.org/10.4102/ve.v35i3.1331>
- Cronkleton, P., Bray, D. B., & Medina, G. (2011). Community forest management and the emergence of multi-scale governance institutions: Lessons for REDD+ development from Mexico, Brazil and Bolivia. *Forests*, 2(2), 451–473. <https://doi.org/10.3390/f2020451>
- Desmiwati. (2016). Studi tentang persepsi dan tingkat partisipasi petani penggarap di Hutan Penelitian Parungpanjang. *Jurnal Perbenihan Tanaman Hutan*, 4(2), 109–124.
- Dongre, P. (2011). Role of socialforestry in sustainable development - A micro level study. *International Journal Of Social Sciences and Humanity Studies*, 3(1), 351–364.
- Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*, 22(1), 7–20. <https://doi.org/10.1080/713701144>
- García-amado, L. R., Pérez, M. R., Iniesta-arandía, I., Dahringer, G., & Reyes, F. (2012). Building ties : social capital network analysis of a forest community in a biosphere reserve in Chiapas , Mexico. *Ecology and Society*, 17(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5751/ES-04855-170303>
- Hasbullah J. (2006). Sosial Capital: Menuju keunggulan budaya manusia Indonesia. *Jurnal de Pediatria*, 89(3 May -June 2013), 269–277.
- Husein, U. (2002). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015*. Jakarta.
- Kumar, V. (2015). Social forestry in India: concept and schemes. *Van Sangyan*, 2 (11) (November, 2015), 18–22. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1652.4243>
- Kusumastuti, A. (2015). Modal sosial dan mekanisme adaptasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur modal sosial dan mekanisme adaptasi masyarakat pedesaan dalam. *Jurnal Sosiologi*, 20(1), 81–97.
- Lawang, R. M. Z. (2004). *Kapital sosial dalam perspektif sosiologik suatu pengantar*. Depok: Universitas Indonesia.
- Lee, Y., Rianti, I. P., & Park, M. S. (2017). Measuring social capital in Indonesian community forest management. *Forest Science and Technology*, 13(3), 133–141. <https://doi.org/10.1080/21580103.2017.1355335>
- Miao, S., Heijman, W., Zhu, X., & Lu, Q. (2015). Social capital influences farmer participation in collective irrigation management in Shaanxi Province, China. *China Agricultural Economic Review*, 7(3), 448–466. <https://doi.org/10.1108/CAER-05-2014-0044>
- Moeliono, M., Thuy, P. T., Bong, I. W., & Wong, G. Y. (2017). Social Forestry - why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. *Forest and Society*, 1(2), 78–97.
- Nath, T. K. (2010). Formation and Function of Social capital for forest resource management and the improved livelihoods of indigenous people in Bangladesh. *Journal of Rural and Community Development*, 5 (3)(2010), 104–122.
- Poffenberger, M. (2006). People in the forest: community forestry experiences from Southeast Asia. *International Journal of Environment and Sustainable Development*, 5(1), 57. <https://doi.org/10.1504/IJESD.2006.008683>
- Pranadji, T. (2006). Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan agroekosistem lahan kering. *Jurnal Agro Ekonomi*, 24(2), 178–206.
- Putnam, R. D. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. *The American Prospect*, 13(13), 35–42. https://doi.org/http://www.prospect.org/cs/articles?article=the_prosperous_community
- Roslinda, E. M. I., Ekyastuti, W., & Kartikawati, S. M. (2017). Social capital of community forest management on Nusapati Village, Mempawah district , West Kalimantan , Indonesia, 18(2), 548–554.

<https://doi.org/10.13057/biodiv/d180215>

- Santika, T., Meijaard, E., Budiharta, S., Law, E. A., Kusworo, A., Hutabarat, J. A., ... Wilson, K. A. (2017). Community forest management in Indonesia: Avoided deforestation in the context of anthropogenic and climate complexities. *Global Environmental Change*, 46(August), 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.08.002>
- Siswiyanti, Y. (2006). *Hubungan Karakteristik Anggota Masyarakat Sekitar Hutan dan Beberapa Faktor Pendukung dengan Partisipasinya dalam Pelestarian Hutan di Kawasan Pemangkuan Hutan Parungpanjang Kabupaten Bogor*. Institut Pertanian Bogor.
- Siteo, A. A., & Guedes, B. S. (2015). Community forestry incentives and challenges in Mozambique. *Forests*, 6(12), 4558–4572. <https://doi.org/10.3390/f6124388>
- Susanto, D. (2010). Strategi peningkatan kapasitas modal sosial dan kualitas sumberdaya manusia pendamping pengembangan masyarakat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 08(1), 77–89. Retrieved from <http://jai.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/view/5696/4324>
- Syahyuti. (2008). Peran modal sosial (Social capital) dalam perdagangan hasil pertanian (The role social capital in agricultural trade). *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26(1), 32–43.
- Widodo, S. (2011). Strategi nafkah berkelanjutan bagi rumah tangga miskin di daerah pesisir (Strategies of sustainable livelihood for poor household in Coastal Area. *Makara, Sosial Humaniora*, 15(1), 10–20.
- Yuliarmi, N. N. (2011). Peran modal sosial dalam pemberdayaan industri kerajinan di Provinsi Bali (Tesis Pascasarjana). Universitas Udayana, Denpasar.